DAFTAR PUSTAKA

Al-Samarrai, Samer. 2003."Financing Primary Education for All: public expenditure and education outcomes in Africa". Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex.

Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan BertanggungJawab. Jakarta

Bakti, Galih Pramilu dan Kodoatie, Johanna Maria 2012. *"Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".* Diponegoro Journal of Economic. Vol. 1, No. 1, Tahun 2012. Halaman1-7.

Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah Dalam Angka*. Berbagai edisi penerbitan. Jawa Tengah: BPS Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik. *Statistik Jawa Tengah*. Berbagai edisi penerbitan. Jawa Tengah: BPS Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Berbagai edisi penerbitan. Daerah Istimewa Yogyakarta: BPS DIY

Badan Pusat Statistik. *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta*. Berbagai edisi penerbitan. Daerah Istimewa Yogyakarta: BPS DIY

Badan Pusat Statistik. *Statistik* Keuangan *Daerah Kabupaten/Kota*. Berbagai edisi penerbitan, Indonesia: BPS Nasional

Chalid, Pheni. 2005. Keuangan Daerah, Investasi Dan Desentralisasi, Tantangan Dan Hambatan. Jakarta: Kemitraan Partnership

Chernichovsky, Dov, dan Oey Astra Meesook. 1985."School Enrollment in Indonesia". Staff Working Paper 746. Washington DC: World Bank

Dauda, Risikat Oladoyin S. 2011. "Effect of Public Educational Spending and Macroeconomic Uncertanty on Schooling Outcomes: evidence from Nigeria". Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 16 (31), 7-21

Dinas Pendidikan Propinsi DIY. Data dan Informasi Pendidikan Propinsi DIY. Berbagai edisi penerbitan. Daerah Istimewa Yogyakarta

Dreher, Axel, Peter Nunnenkamp, dan Rainer Thiele. 2006. "Does Aid For

Education Educate Children? evidence from panel data". Kiel Working Paper No. 129, Jerman: Kiel Institute.

Filmer, Deon. 2000. "The Structure of Social Disparities in Education: Gender and Wealth". Policy Research Working Paper 2268.Washington DC: World Bank.

Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisikelima). Semarang: Universitas Diponegoro

Guryan, Jonathan. 2001. "Does Money Matter? regression-discontinuity estimates from education finance reform in Massachusetts". NBER Working Paper No. 8269, Cambridge: National Bureu of Economic Research.

Handa, Sudhanshu. 2002. "Raising Primary School Enrolment in Developing Countries: the relative importance of supply and demand". Journal of Development Economics, 69, 103-128.

Hirawan, Susiyati Bambang. 2007. Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Huda Noval Akhmad, dan Hadi Sasana. 2013." Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta)". Diponegoro Journal of Economics

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan

Khotijah Umi. 2015. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap *Outcomes* Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus :Provinsi Jateng Tahun 2011 dan 1012)". Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi UMS

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga, Jakarta

Litschig, Stephan, dan Kevin M. Morisson. 2013. The Impact of Intergovermental Transfers on Education Outcomes and Poverty Reduction. Universitas Pompeu Fabra. http://www.econ.upf.edu/~slitschig/pdfs/Intergovernmental_Transfers_Feb ruary_2013.pdf

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis

Perekonomian Daerah. Makalah disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia. Jakarta, 7 Mei 2002.

Mujiyati dan Heppy Purbasari. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf, Dan Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 Dan 2011. Seminar Nasional Dan Call For Paper, Program Studi Akuntansi-FEB UMS, 25 Juni 2014.

Oates, W.E. 1993. *Fiskal Decentralization And Economic Development*, National Tax Journal

Rachmawati, D. S, dan Sumarminingsih, E. 2014. Metode Standard Error Newey West Untuk Mengatasi Heteroskedastisitas dan Autokorelasi Pada Analisis Regresi Linier Berganda. Jurnal Mahasiswa Statistik, 2(1), PP-65.

Radianto, Elia. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi Di Maluku. Prisma.Vol. 3, 1997.

Rajkumar, Andrew Sunil dan Vinaya Swaroop. 2008. "Public Spending and Outcome: Does Governance Matter?" Journal of Development Economics, 86, 96-111.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah.

Solechah, 2013. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah)". Tesis: Program Studi MIESP Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang

Sugiyono, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta

Tarigan, Robinson, 2009. Ekonomi Regional. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

PP nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah